Department of Digital Business
**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 8315-8324
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

# Analisis Kinerja Keuangan APBD Kabupaten Kebumen Berdasarkan Rasio Keuangan Daerah Tahun 2023–2025

Annisa Septia Kurniadewi, Ruth Oktafiana Sitompul, Nurita Manurung, Devi Apriliana, Fitri Salsabyla, Putri Latifa Nur Aulia, Dudi Duta Akbar
Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika
63230590@bsi.ac.id, 63230451@bsi.ac.id, 63230717@bsi.ac.id, 63230801@bsi.ac.id, 63231422@bsi.ac.id, 63230813@bsi.ac.id, dudi.ddb@bsi.ac.id

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2023–2025 berdasarkan rasio keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian fiskal serta efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan dan belanja daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari APBD dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kebumen yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio keuangan daerah, yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio efisiensi keuangan daerah. Rasio-rasio tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran melalui PAD, serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal mengalami peningkatan dari 14,78% pada tahun 2023 menjadi 18,91% pada tahun 2025, namun masih berada dalam kategori kurang. Rasio kemandirian keuangan daerah juga mengalami peningkatan dari 17,35% menjadi 23,32%, tetapi masih menunjukkan pola hubungan instruktif yang berarti ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kondisi yang efektif pada tahun 2024 dan 2025, sedangkan rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan adanya perbaikan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen menunjukkan tren peningkatan, namun tingkat kemandirian fiskal masih rendah dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup dominan.*

*Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, APBD, Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Kebumen*

## 1. Latar Belakang

Pemerintah merupakan organisasi yang diberi kewenangan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara melalui penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, serta pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin menguat seiring diterapkannya otonomi daerah [1]. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola sumber daya keuangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD berfungsi sebagai rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, pembiayaan, serta program pembangunan [2].

Fungsi anggaran dalam sistem pemerintah daerah merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan yang demokratis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat [3]. Anggaran tidak hanya berisi angka penerimaan dan belanja, tetapi juga mencerminkan prioritas fiskal pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Dalam hal ini, anggaran dapat dipahami sebagai instrumen politik fiskal yang menjembatani aspirasi publik dengan prioritas pembangunan daerah [4]. Selain itu, anggaran juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan [5].

Dalam perspektif akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode tertentu. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan entitas, serta membantu menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan [6]. Oleh karena itu, analisis terhadap APBD dan laporan realisasi anggaran menjadi penting untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah secara objektif.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki karakteristik geografis dan demografis yang beragam. Secara geografis, Kabupaten Kebumen memiliki wilayah dataran rendah di bagian selatan, termasuk kawasan pesisir, serta wilayah perbukitan dan pegunungan di bagian utara. Kondisi geografis tersebut menuntut ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata agar konektivitas antarwilayah dapat terjaga serta aktivitas sosial-ekonomi masyarakat dapat berjalan secara optimal [7]. Dalam pembangunan daerah, peningkatan dan pengembangan infrastruktur, khususnya jaringan jalan, menjadi aspek penting karena berperan sebagai penggerak konektivitas, distribusi barang dan jasa, serta mobilitas masyarakat. Tanpa jaringan jalan yang memadai, kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat berisiko mengalami hambatan [8].

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen mencakup berbagai sektor penting seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya yang berperan dalam meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Namun, pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan anggaran yang besar serta pengelolaan belanja yang efektif. Pengelolaan anggaran belanja merupakan elemen kunci dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah, terutama pada sektor infrastruktur [9]. Dalam praktiknya, pengelolaan dana publik pada sektor tersebut sering menghadapi tantangan terkait akuntabilitas, ketepatan perencanaan, efektivitas pelaksanaan, dan pengukuran kinerja. Oleh karena itu, pembangunan daerah perlu memperhatikan prinsip tepat mutu, tepat biaya, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat [10].

Permasalahan yang muncul di Kabupaten Kebumen berkaitan dengan efektivitas realisasi anggaran, khususnya pada belanja daerah dan belanja modal infrastruktur. Pada tahun 2025, total belanja daerah tercatat sebesar Rp3,17 triliun dengan alokasi belanja modal infrastruktur sebesar Rp282,28 miliar. Namun, hingga Maret 2025, realisasi belanja modal baru mencapai Rp8,22 miliar atau sekitar 2,91% dari total anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran pada awal tahun masih rendah dan berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalan di Kabupaten Kebumen. Rendahnya realisasi belanja pada awal periode juga dapat mencerminkan belum optimalnya perencanaan, kesiapan administrasi, dan pelaksanaan kegiatan, sehingga berisiko menghambat pencapaian target pembangunan secara efektif dan tepat waktu. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah adalah analisis rasio keuangan terhadap APBD [11]

Analisis rasio keuangan daerah digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan membandingkan komponen-komponen penting dalam APBD dan laporan realisasi anggaran. Melalui rasio keuangan, dapat diketahui kecenderungan kemampuan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan terhadap dana transfer, efektivitas realisasi PAD, serta efisiensi pengelolaan belanja. Rasio keuangan membantu menilai kekuatan dan kelemahan kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan yang tersedia [12]. Dalam konteks pemerintah daerah, rasio yang relevan digunakan antara lain rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengidentifikasi karakteristik keuangan suatu entitas berdasarkan laporan keuangan yang tersedia [13].

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pengelolaan APBD periode 2023–2025 dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan daerah. Analisis dilakukan melalui pengukuran rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah, efektivitas pengelolaan PAD, tingkat ketergantungan terhadap dana transfer, serta efisiensi pengelolaan anggaran sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9520
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan perhitungan rasio keuangan daerah. Data yang digunakan berupa angka-angka keuangan yang bersumber dari dokumen APBD dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), kemudian dianalisis melalui perhitungan rasio untuk menilai kondisi desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kebumen selama periode 2023–2025. Data penelitian diakses melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, yaitu https://djpk.kemenkeu.go.id/. Metode kuantitatif digunakan karena penelitian ini mengolah data numerik untuk menghasilkan ukuran kinerja keuangan daerah. Secara umum, metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk menganalisis data dalam bentuk angka secara sistematis [14]. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kuantitatif tidak digunakan untuk menguji hipotesis statistik, tetapi untuk menghitung dan menginterpretasikan rasio keuangan daerah secara deskriptif.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rasio keuangan daerah. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan komponen-komponen penting dalam APBD dan LRA, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), total pendapatan daerah, pendapatan transfer, anggaran PAD, realisasi PAD, serta komponen belanja atau biaya yang relevan. Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dilakukan melalui analisis rasio keuangan berdasarkan data dalam Laporan Realisasi Anggaran [15]. Dalam penelitian ini, rasio keuangan digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan fiskal daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, efektivitas realisasi PAD, dan efisiensi pengelolaan keuangan Kabupaten Kebumen selama periode 2023–2025.

Perhitungan Rasio Keuangan dilakukan dengan cara:

### 2.1 Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal digunakan untuk mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan fiskalnya melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri.

$$\text{Rumus} = \frac{Pendapatam\ Asli\ Daerah\ (PAD)}{Total\ Pendapatan\ Daerah}\ x\ 100\%$$

Nilai derajat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria nilai derajat desentralisasi fiskal

| DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL | POLA HUBUNGAN |
|---|---|
| 0% - 10% | SANGAT KURANG |
| 10% - 20% | KURANG |
| 20% - 30% | SEDANG |
| 30% - 40% | CUKUP |
| 40% - 50% | BAIK |
| >50% | SANGAT BAIK |

Sumber: Madaniyah & Widiasih (2024)

### 2.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9520
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

transfer. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

$$\text{Rumus} = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah\ (PAD)}{Pendapatan\ Transfer}\ x\ 100\%$$

Nilai kemandirian daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria nilai kemandirian keuangan daerah

| KEMAMPUAN DAERAH | PERSENTASE KEMANDIRIAN | KEMANDIRIAN |
|---|---|---|
| RENDAH SEKALI | 0% - 25% | INSTRUKTIF |
| RENDAH | 25% - 50% | KONSULTATIF |
| SEDANG | 50% - 75% | PARTISIPATIF |
| TINGGI | 75% - 100% | DELEGATIF |

Sumber: Wulandari dkk. (2023)

### 2.3 Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dibandingkan dengan target atau anggaran PAD yang telah ditetapkan. Rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai target pendapatan asli daerah.

$$\text{Rumus} = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pendapatan\ Asli\ Daerah\ (PAD)}{Anggaran\ Pendapatan\ Asli\ Daerah}\ x\ 100\%$$

Nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria nilai efektivitas PAD

| PERSENTASE EFEKTIFITAS | KRITERIA EFEKTIVITAS |
|---|---|
| <100% | TIDAK EFEKTIF |
| 100% | EFEKTIVITAS BERIMBANG |
| >100% | EFEKTIF |

Sumber: Wulandari dkk. (2023)

### 2.4 Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi digunakan untuk menilai perbandingan antara biaya atau belanja yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, rasio efisiensi harus disesuaikan dengan ketersediaan data. Apabila data biaya pemungutan PAD tersedia, maka rasio yang digunakan adalah rasio efisiensi PAD. Namun, apabila data biaya pemungutan PAD tidak tersedia dalam APBD atau LRA, maka penelitian perlu menjelaskan secara tegas komponen biaya atau belanja apa yang digunakan sebagai dasar perhitungan efisiensi.

$$\text{Rumus} = \frac{Biaya\ yang\ DIkeluarkan\ untuk\ Memungut\ Pendapatan}{Realisasi\ Penerimaan\ Pendapatan}\ x\ 100\%$$

Nilai efisiensi PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria nilai efisiensi PAD

| PERSENTASE EFISIENSI | KRITERIA EFISIENSI |
|---|---|
| <100% | EFISIEN |
| 100% | EFISIENSI BERIMBANG |
| >100% | TIDAK EFISIEN |

Sumber: Wulandari dkk. (2023)

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9520
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dalam penelitian ini, hasil perhitungan rasio kemudian dibandingkan dengan kriteria penilaian masing-masing rasio. Interpretasi dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan kecenderungan kinerja keuangan Kabupaten Kebumen selama periode 2023–2025. Dengan demikian, analisis tidak hanya menampilkan angka rasio, tetapi juga menjelaskan makna fiskalnya, seperti tingkat kemandirian daerah, ketergantungan terhadap dana transfer, efektivitas pencapaian PAD, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

## 3. Hasil dan Diskusi

Berikut ini disajikan rangkuman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kebumen tahun 2023–2025. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melalui laman https://djpk.kemenkeu.go.id/. Data tersebut digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah melalui perhitungan rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah

Tabel 5. Laporan Anggaran APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2025 (Dalam Miliar Rupiah)

| **Uraian** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 2.833,17 | 3.029,98 | 2.995,08 |
| Pendapatan Asli Daerah | 432,82 | 467,19 | 568,90 |
| Pendapatan Transfer | 2.398,17 | 2.562,69 | 2.426,17 |
| Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 244,30 | 268,23 | 11,88 |
| Belanja Daerah | 3.070,11 | 3.204,82 | 3.173,04 |

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/

Tabel 6. LRA Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2025 (Dalam Miliar Rupiah)

| **Uraian** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 2.718,16 | 3.137,69 | 3.069,38 |
| Pendapatan Asli Daerah | 401,66 | 484,29 | 580,48 |
| Pendapatan Transfer | 2.314,97 | 2.634,85 | 2.488,9 |
| Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 249,21 | 289,77 | 14,53 |
| Belanja Daerah | 2.750,13 | 3.126,69 | 3.026,23 |

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/

Berdasarkan Tabel 5 dan Tabel 6, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dari Rp2.718,16 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp3.137,69 miliar pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi Rp3.069,38 miliar pada tahun 2025. Penurunan pada tahun 2025 tidak terlalu besar, tetapi tetap perlu dicermati karena menunjukkan bahwa kapasitas pendapatan daerah belum sepenuhnya stabil. Selain itu, status data tahun 2025 perlu dipastikan apakah sudah merupakan realisasi final atau masih berupa data berjalan.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdapat tren peningkatan yang cukup konsisten. Realisasi PAD meningkat dari Rp401,66 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp484,29 miliar pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi Rp580,48 miliar pada tahun 2025. Peningkatan PAD ini merupakan sinyal positif karena menunjukkan adanya perbaikan kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan lokal. Namun, peningkatan PAD belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Kabupaten Kebumen telah mandiri secara fiskal karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah.

Pendapatan transfer masih menjadi komponen dominan dalam struktur pendapatan Kabupaten Kebumen. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp2.314,97 miliar pada tahun 2023, meningkat menjadi Rp2.634,85 miliar pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi Rp2.488,90 miliar pada tahun 2025. Tingginya pendapatan transfer menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Kebumen masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat. Dengan demikian, meskipun PAD meningkat, struktur pendapatan daerah masih belum cukup kuat untuk mencerminkan kemandirian fiskal yang tinggi.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9520
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, terjadi penurunan tajam dari Rp289,77 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp14,53 miliar pada tahun 2025. Penurunan ini perlu dijelaskan secara lebih rinci karena dapat memengaruhi struktur total pendapatan daerah. Mahasiswa perlu memastikan apakah penurunan tersebut terjadi karena perubahan klasifikasi pendapatan, berkurangnya pendapatan insidental, perubahan kebijakan transfer, atau faktor teknis pelaporan.

Dari sisi belanja daerah, realisasi belanja meningkat dari Rp2.750,13 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp3.126,69 miliar pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi Rp3.026,23 miliar pada tahun 2025. Pola ini menunjukkan bahwa belanja daerah relatif besar dan perlu dikendalikan agar tetap seimbang dengan kapasitas pendapatan daerah. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan Kabupaten Kebumen tidak cukup hanya melihat peningkatan PAD, tetapi juga perlu memperhatikan keseimbangan antara pendapatan, belanja, serta ketergantungan terhadap transfer pusat.

Secara umum, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kebumen periode 2023–2025 menunjukkan adanya perbaikan pada aspek PAD dan efektivitas pencapaian target PAD. Namun, kinerja keuangan daerah belum dapat dikategorikan kuat karena kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah dan ketergantungan terhadap pendapatan transfer masih tinggi. Dengan demikian, hasil analisis perlu diarahkan pada kesimpulan yang seimbang: terdapat tren perbaikan, tetapi kemandirian fiskal Kabupaten Kebumen masih terbatas.

### 3.1 Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal digunakan untuk mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan fiskalnya melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri

Berikut adalah hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Kebumen tahun 2023-2025:

Tabel 7. Hasil Rasio Desentralisasi Fiskal dan Pola Hubungan Kabupaten Kebumen (Dalam Miliar Rupiah dan Persentase)

| Tahun | Total PAD | Total Pendapatan Daerah | Rasio (Persentase) | Kriteria |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 401,66 | 2.718,16 | 14,78 | Kurang |
| 2024 | 484,29 | 3.137,69 | 15,43 | Kurang |
| 2025 | 580,48 | 3.069,38 | 18,91 | Kurang |

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 7, rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Kebumen menunjukkan tren peningkatan dari 14,78% pada tahun 2023 menjadi 15,43% pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi 18,91% pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah semakin besar dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi sinyal positif karena pemerintah daerah mulai menunjukkan perbaikan dalam menggali potensi pendapatan lokal.

Namun demikian, seluruh nilai rasio selama periode 2023–2025 masih berada dalam kategori “kurang”. Artinya, meskipun terdapat peningkatan PAD, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah belum cukup besar untuk menunjukkan desentralisasi fiskal yang kuat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur pendapatan Kabupaten Kebumen masih sangat dipengaruhi oleh sumber pendapatan di luar PAD, terutama pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Dengan demikian, rasio desentralisasi fiskal menunjukkan dua hal penting. Pertama, terdapat perbaikan kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah. Kedua, tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Kebumen masih rendah karena PAD belum menjadi sumber pendapatan utama daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat basis PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9520
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

### 3.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan transfer. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat

Tabel 8. Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pola Hubungan Kabupaten Kebumen (Dalam Miliar Rupiah dan Persentase)

| Tahun | Total PAD | Total Pendapatan Transfer | Rasio (Persentase) | Kriteria |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 401,66 | 2.314,97 | 17,35 | Instruktif |
| 2024 | 484,29 | 2.634,85 | 18,39 | Instruktif |
| 2025 | 580,48 | 2.488,9 | 23,32 | Instruktif |

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 8, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kebumen meningkat dari 17,35% pada tahun 2023 menjadi 18,39% pada tahun 2024, lalu naik menjadi 23,32% pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kemampuan daerah meningkatkan PAD relatif terhadap pendapatan transfer.

Namun, seluruh nilai rasio masih berada pada pola hubungan instruktif. Pola instruktif menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih sangat dominan dalam membiayai kebutuhan fiskal daerah. Dengan kata lain, peningkatan PAD belum cukup untuk mengurangi ketergantungan Kabupaten Kebumen terhadap pendapatan transfer. Kondisi ini menjadi catatan penting karena kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator utama keberhasilan otonomi daerah.

Peningkatan rasio pada tahun 2025 perlu diapresiasi, tetapi tidak boleh ditafsirkan secara berlebihan. Rasio 23,32% masih berada di bawah batas 25% sehingga belum masuk kategori konsultatif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi peningkatan PAD secara berkelanjutan, terutama melalui intensifikasi pajak daerah, perluasan basis retribusi, digitalisasi penerimaan daerah, pengelolaan aset produktif, dan pengembangan sektor ekonomi lokal.

### 3.3 Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Rasio ini menunjukkan seberapa efektif pemerintah daerah mencapai target pendapatan asli daerah.

Tabel 9. Hasil Rasio Efektivitas PAD dan Pola Hubungan Kapubaten Kebumen (Dalam Miliar Rupiah dan Persentase)

| Tahun | Total Realisasi Anggaran PAD | Total Anggaran PAD | Rasio (Persentase) | Kriteria |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 401,66 | 432,82 | 92,8 | Tidak Efektif |
| 2024 | 484,29 | 467,19 | 103,67 | Efektif |
| 2025 | 580,48 | 568,90 | 102,03 | Efektif |

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 9, rasio efektivitas PAD Kabupaten Kebumen menunjukkan perbaikan yang cukup jelas. Pada tahun 2023, rasio efektivitas PAD sebesar 92,80%, sehingga termasuk dalam kategori tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD belum mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya kendala dalam pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset, atau perencanaan target PAD yang belum sepenuhnya realistis.

Pada tahun 2024, rasio efektivitas PAD meningkat menjadi 103,67%, sehingga masuk kategori efektif. Realisasi PAD yang melampaui target menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan kinerja penerimaan PAD. Pada tahun 2025, rasio efektivitas PAD tetap berada dalam kategori efektif sebesar 102,03%, meskipun

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9520
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih mampu mempertahankan realisasi PAD di atas target yang ditetapkan.

Meskipun demikian, efektivitas PAD yang tinggi perlu ditafsirkan secara hati-hati. Rasio efektivitas yang melampaui 100% dapat menunjukkan keberhasilan pemungutan PAD, tetapi juga dapat mengindikasikan bahwa target PAD ditetapkan terlalu rendah. Oleh karena itu, analisis efektivitas PAD sebaiknya tidak hanya melihat capaian terhadap target, tetapi juga mengevaluasi kualitas perencanaan target PAD, basis pajak daerah, kepatuhan wajib pajak, serta potensi pendapatan yang belum tergarap..

### 3.4 Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi keuangan daerah digunakan untuk membandingkan realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan sejauh mana belanja daerah dapat dikendalikan agar tidak melebihi kapasitas pendapatan daerah. Dalam penelitian ini, istilah yang lebih tepat digunakan adalah rasio efisiensi keuangan daerah, bukan rasio efisiensi PAD, karena komponen yang digunakan adalah realisasi belanja daerah dan realisasi pendapatan daerah.

Tabel 10. Hasil Rasio Efisiensi PAD dan Pola Hubungan Kabupaten Kebumen (Dalam Miliar Rupiah dan Persentase)

| Tahun | Total Realisasi Belanja Daerah | Total Realisasi Pendapatan Daerah | Rasio (Persentase) | Kriteria |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.750,13 | 2.718,16 | 101,18 | Tidak Efisien |
| 2024 | 3.126,69 | 3.137,69 | 99,64 | Efisien |
| 2025 | 3.026,23 | 3.069,38 | 98,6 | Efisien |

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 10, rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Kebumen menunjukkan perbaikan dari tahun 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, rasio efisiensi sebesar 101,18%, sehingga termasuk kategori tidak efisien. Nilai tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah lebih besar daripada realisasi pendapatan daerah. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan belanja yang melebihi kapasitas pendapatan pada tahun tersebut.

Pada tahun 2024, rasio efisiensi menurun menjadi 99,64% dan masuk kategori efisien. Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa belanja daerah mulai lebih terkendali dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Pada tahun 2025, rasio efisiensi kembali menurun menjadi 98,60%, sehingga tetap berada dalam kategori efisien. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian belanja daerah.

Namun demikian, nilai efisiensi yang hanya sedikit di bawah 100% perlu ditafsirkan secara hati-hati. Rasio 99,64% dan 98,60% memang masuk kategori efisien menurut kriteria yang digunakan, tetapi jaraknya masih sangat dekat dengan batas tidak efisien. Artinya, ruang fiskal Kabupaten Kebumen masih relatif sempit karena sebagian besar pendapatan daerah digunakan untuk membiayai belanja. Oleh karena itu, efisiensi keuangan daerah perlu diperkuat melalui pengendalian belanja yang lebih produktif, penajaman prioritas program, dan peningkatan kualitas belanja agar anggaran tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan manfaat pembangunan.

Berdasarkan hasil perhitungan empat rasio keuangan daerah, kinerja keuangan Kabupaten Kebumen periode 2023–2025 menunjukkan perkembangan yang positif, tetapi belum sepenuhnya kuat. Rasio desentralisasi fiskal meningkat dari 14,78% menjadi 18,91%, tetapi masih berada dalam kategori kurang. Rasio kemandirian keuangan daerah juga meningkat dari 17,35% menjadi 23,32%, tetapi tetap berada dalam pola hubungan instruktif. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Dari sisi efektivitas PAD, kinerja pemerintah daerah menunjukkan perbaikan karena rasio efektivitas meningkat dari kategori tidak efektif pada tahun 2023 menjadi efektif pada tahun 2024 dan 2025. Namun, capaian efektivitas PAD di atas 100% tetap perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan apakah peningkatan tersebut berasal dari optimalisasi PAD atau dari target yang relatif konservatif. Sementara itu, rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan perbaikan dari tidak efisien pada tahun 2023 menjadi efisien pada tahun 2024 dan 2025, meskipun nilainya masih berada dekat dengan batas 100%.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9520
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen mengalami perbaikan dalam pengelolaan PAD dan pengendalian belanja, tetapi kemandirian fiskalnya masih terbatas. Tantangan utama pemerintah daerah adalah memperluas basis PAD, mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, meningkatkan kualitas perencanaan target pendapatan, serta memastikan belanja daerah lebih produktif dan berorientasi pada hasil pembangunan.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen tahun 2023–2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen menunjukkan perbaikan pada beberapa indikator, terutama pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas pencapaian target PAD, dan pengendalian belanja daerah. Namun demikian, perbaikan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan kemandirian fiskal yang kuat karena struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Hasil analisis rasio desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mengalami peningkatan dari 14,78% pada tahun 2023 menjadi 15,43% pada tahun 2024, dan 18,91% pada tahun 2025. Meskipun meningkat, seluruh nilai rasio tersebut masih berada dalam kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Kebumen dalam membiayai kebutuhan daerah melalui sumber pendapatan sendiri masih terbatas. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan peningkatan dari 17,35% pada tahun 2023 menjadi 18,39% pada tahun 2024, dan 23,32% pada tahun 2025. Namun, rasio tersebut masih berada dalam pola hubungan instruktif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah pusat masih dominan dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, peningkatan PAD belum cukup untuk mengurangi ketergantungan fiskal Kabupaten Kebumen terhadap pendapatan transfer. Dari sisi efektivitas PAD, Pemerintah Kabupaten Kebumen menunjukkan kinerja yang lebih baik. Rasio efektivitas PAD meningkat dari 92,80% pada tahun 2023 atau kategori tidak efektif menjadi 103,67% pada tahun 2024 dan 102,03% pada tahun 2025 atau kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan PAD sesuai, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, capaian efektivitas di atas 100% tetap perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan apakah peningkatan tersebut berasal dari optimalisasi penerimaan atau karena target PAD yang ditetapkan relatif konservatif. Pada rasio efisiensi keuangan daerah, Kabupaten Kebumen mengalami perbaikan dari 101,18% pada tahun 2023 atau kategori tidak efisien menjadi 99,64% pada tahun 2024 dan 98,60% pada tahun 2025 atau kategori efisien. Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa belanja daerah mulai lebih terkendali dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Namun, karena nilainya masih mendekati batas 100%, ruang fiskal daerah tetap perlu dijaga melalui pengendalian belanja yang lebih selektif, produktif, dan berorientasi pada hasil pembangunan. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Kabupaten Kebumen selama periode 2023–2025 menunjukkan tren perbaikan, tetapi belum dapat dikategorikan kuat secara fiskal. Tantangan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kontribusi PAD, memperluas basis pajak dan retribusi daerah, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, meningkatkan kualitas perencanaan target pendapatan, serta memastikan belanja daerah lebih efisien, produktif, dan berdampak langsung terhadap pelayanan publik serta pembangunan daerah.

## Referensi

[1] N. Putri, “Analisis Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Lampung,” vol. 1, no. 2, pp. 2–5, 2024.
[2] A. Firman, A. Sulvina, D. Natalia, E. P. Sinaga, and S. Hadiningrum, “Implementasi Prinsip Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah,” vol. 8, pp. 50417–50421, 2024.
[3] K. Mudhoffar, A. Frinaldi, and N. E. Putri, “Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Padang Tahun Anggaran 2024,” vol. 9, pp. 19824–19831, 2025.
[4] V. B. Kelen, U. Katolik, and W. Mandira, “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DALAM OPTIMALISASI PROGRAM PRIORITAS : STUDI EVALUATIF BELANJA PUBLIK DI KABUPATEN FLORES TIMUR,” vol. 5, no. 1, pp. 179–186, 2025.
[5] I. Gazali, V. Pattiasina, and I. Agustina, “PEMERINTAH,” vol. 14, pp. 2364–2376, 2025, doi: 10.34127/jrlab.v14i2.1586.
[6] Y. Prayogo, A. S. Fikri, and K. P. Nandini, “Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah,” vol. 3, no. 2, pp. 44–58, 2023.
[7] I. A. Ardi, N. R. Widiastuti, S. R. Hidayati, and M. Niken, “Indikasi Wilayah Pengembangan ( WP ) sebagai Pendekatan Perencanaan dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kebumen,” vol. 2024, no. November, pp. 299–306, 2024.
[8] R. F. Kasim, G. C. Murti, J. Elnisa, P. Nur, and N. A. Azmarani, “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Kebumen Tahun 2019-,” vol. 4, no. 1, 2025.
[9] J. N. Faqih, “Analisis Beban Kendaraan Terhadap Kerusakan Perkerasan Jalan Lentur ( Aspal ) di Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen,” vol. 4, no. 01, pp. 18–27, 2025.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9520
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

[10] S. Astuti, D. Santoso, and Y. Hardayani, "Penerapan Prinsip Value For Money Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Tahun 2024 ( Studi Pada Program Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa )," vol. 7, no. SEPTEMBER, pp. 121–132, 2025.
[11] F. A. Nugroho, "MENDUKUNG OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020-2024," vol. 20, no. November, pp. 30–47, 2025.
[12] A. Sukmawati, S. A. Murnidayanti, and K. Permana, "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI PERIODE 2021-2023," vol. 10, no. 204, pp. 1832–1841, 2025.
[13] D. Anita, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Barat )," vol. 10, no. 71, 2024.
[14] N. A. Jauza and M. Albina, "Model dan Pendekatan Penelitian Kuantitatif : Kajian Filosofis , Metodologis , dan Aplikatif," pp. 104–111, 2025.
[15] U. Islam and S. Agung, "Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah melalui Rasio Keuangan : Studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023," vol. 4, no. 5, pp. 2314–2322, 2025.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9520
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)